

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA PAMMULUKANG KECAMATAN KALUKKU KABUPATEN MAMUJU

¹Norma Yunita ²Muhlis Zainuddin ³Muhammad Akbar S

Program studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tomakaka

Jl.Ir.Djuanda No.77 Kelurahan Mamunyu,Kecamatanmamuju,Kabupaten
mamuju

Abstract

This study aims to describe and analyze community participation in the Village Development Planning Meeting (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Musrenbangdes) in Pammulukang Village, Kalukku District, Mamuju Regency. Community participation is an essential element in village development planning because it determines the suitability of development programs with community needs and aspirations. This study employed a qualitative research method with a descriptive approach. Data were collected through observation, questionnaires, interviews, and documentation involving village government officials and community members of Pammulukang Village as informants. Data analysis was conducted through data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results indicate that community participation in the Musrenbangdes in Pammulukang Village is categorized as moderately participatory, as reflected in community involvement in decision-making, implementation of development activities, monitoring and evaluation, and utilization of development outcomes. However, such participation has not been fully optimal due to factors such as education level, occupation and income,

Keywords: Community Participation, Musrenbangdes, Village Development Planning

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Pammulukang, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju. Partisipasi masyarakat merupakan unsur penting dalam perencanaan pembangunan desa karena menentukan kesesuaian program pembangunan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, angket, wawancara, dan dokumentasi dengan melibatkan aparatur pemerintah desa serta masyarakat Desa Pammulukang sebagai informan. Analisis data dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes di Desa Pammulukang berada pada kategori cukup berpartisipasi, yang terlihat dari keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan pembangunan, pemantauan dan evaluasi, serta pemanfaatan hasil pembangunan. Namun demikian, partisipasi tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih dipengaruhi oleh faktor pendidikan, pekerjaan dan penghasilan, usia, serta rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya Musrenbangdes

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Musrenbangdes, Perencanaan Pembangunan Desa



Pendahuluan

Pergeseran pembangunan dari pusat ke desa secara langsung mendorong upaya perbaikan sistem pemerintahan dan perencanaan yang lebih terintegrasi. Dimana perencanaan yang disusun dalam berbagai tingkatan pembangunan memiliki karakteristik kemajemukan, demokratis, jangka panjang, transparansi dan akuntabilitas yang diharapkan mampu menjawab persoalan yang dihadapi langsung oleh masyarakat di lapisan bawah. Kebijakan dan strategi pembangunan desa diarahkan untuk mewujudkan pemerintahan desa yang demokratis, transparan dan akuntabel serta untuk mensejahterakan masyarakat. Perencanaan pembangunan desa merupakan suatu panduan atau model penggalian potensi dan gagasan pembangunan desa yang menitikberatkan pada peran serta masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan. Konsep ini dilandasi oleh nilai-nilai dan semangat gotong-royong yang telah mengakar dalam budaya masyarakat Indonesia. Gotong royong bertumpu pada keyakinan bahwa setiap warga masyarakat memiliki hak untuk memutuskan dan merencanakan apa yang terbaik bagi diri dan lingkungan serta cara terbaik dalam upaya mewujudkannya.

Musyawarah perencanaan desa biasa dikenal dengan istilah Musbangdes (Musyawarah Pembangunan Desa) merupakan wahana perencanaan partisipatif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) di tingkat desa/kelurahan untuk menemukan dan mengenali masalah, potensi, kebutuhan, tantangan eksternal dan menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat. Musrenbang desa sebagai forum publik dalam rangka dialog dan pembahasan kegiatan perencanaan (program) yang diselenggarakan oleh pemerintah desa/kelurahan bekerjasama dengan warga dan para pemangku kepentingan. Penyelenggaraan musrenbang merupakan salah satu tugas pemerintah desa/kelurahan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Desa merupakan satuan kecil wilayah pemerintahan di Republik Indonesia, posisi tersebut menempatkan pemerintah desa sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat. Hal ini tercantum dalam tujuan dari pengaturan desa dalam UU Nomor 6 Tahun 2014, pasal 4 2 huruf f, meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum. Desa harus mampu berkembang secara mandiri dengan memanfaatkan berbagai potensi yang ada. Segala potensi yang ada harus diupayakan mampu memberikan

nilai lebih kepada seluruh masyarakat desa dengan prinsip kesejahteraan bersama dan keberlanjutan. Proses membangun kemandirian desa tersebut dapat kita persepsikan sebagai sebuah proses pembangunan desa, dimana semua potensi teridentifikasi dengan baik dan dioptimalkan manfaatnya untuk kebaikan bersama

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) diselenggarakan dengan maksud untuk memfasilitasi keterlibatan berbagai pihak melalui proses dialog, berdiskusi dan memformulasikan berbagai persoalan yang dihadapi terkait kebutuhan, masa depan dan rencana pembangunan desa. Secara khusus tujuan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang desa), yaitu: menyepakati prioritas kebutuhan atau kegiatan desa yang akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa), menyepakati prioritas kegiatan desa yang akan dilaksanakan desa sendiri dan dibiayai melalui dana swadaya desa/masyarakat, menyepakati prioritas kegiatan desa yang akan dilaksanakan desa sendiri yang dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari APBD Kabupaten/Kota atau sumber dana lain, dan menyepakati prioritas kegiatan desa yang akan diusulkan melalui Musrenbang Kecamatan untuk menjadi kegiatan Pemerintah Daerah dan dibiayai melalui APBD Kab./Kota atau APBD Provinsi, menyepakati Tim Delegasi Desa yang akan memaparkan persoalan daerah yang ada di desanya pada forum Musrenbang Kecamatan untuk penyusunan program Pemerintah Daerah/SKPD pada tahun berikutnya.

Berdasarkan keterlibatan penulis di lapangan bahwa masyarakat yang datang dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Pammulukang hanya beberapa orang saja yang turut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Artinya tingkat partisipasi Masyarakat dalam Musrenbangdes semakin menurun dan hasil dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) tersebut tidak dapat mengakomodasi keinginan dan harapan masyarakat.

Rumusan Masalah

Rumusa masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Pammulukang Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju?

Tujuan Penelitian

Untuk menjelaskan dan mendeskripsikan Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Pammulukang Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dan dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara praktis, yakni memberikan data dan informasi yang berguna bagi semua kalangan terutama mereka yang secara serius mengamati jalannya Musrenbangdes, serta memberikan masukan bagi masyarakat khususnya di tempat penelitian ini dilaksanakan agar dapat terus meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbangdes di Desa Pammulukang.
2. Secara akademis, yakni penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara langsung ataupun tidak langsung bagi kepastakaan Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tomakaka Mamuju, dan bagi kalangan penulis lainnya yang tertarik untuk mengeksplorasi kembali kajian tentang Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di daerah lain.

Partisipasi Masyarakat

Sejak sebelum-sebelumnya telah berkembang konsep partisipasi yang berorientasi pada perencanaan dan implementasi pembangunan. Dalam konteks pembangunan, dari hasil elaborasi terhadap pendapat para kontributor, Suhirman (2007:3) mengungkapkan bahwa Stiefel dan Wolfe mengartikan Partisipasi Sosial sebagai upaya terorganisasi untuk meningkatkan pengawasan terhadap sumber daya dan lembaga pengatur dalam keadaan sosial tertentu oleh berbagai kelompok dan gerakan yang sampai sekarang dikesampingkan dalam fungsi pengawasan. Partisipasi ditempatkan sebagai keterlibatan masyarakat terutama yang dipandang sebagai “penerima” pembangunan dalam konsultasi atau pengambilan keputusan dalam semua tahapan siklus proyek pembangunan dari evaluasi kebutuhan sampai penilaian, implementasi, pemantauan dan evaluasi. Berbeda dengan partisipasi politik yang lebih menekankan perwakilan dan partisipasi sosial yang menempatkan partisipasi di luar lembaga pemerintahan, partisipasi warga menekankan pada partisipasi langsung warga dalam pengambilan Keputusan pada lembaga dan proses pemerintahan. Mengenai hal ini Gaventa dan Valderama dalam Suhirman (2007:3), menegaskan bahwa partisipasi warga telah mengalihkan konsep partisipasi dari sekedar kepedulian terhadap penerima derma atau kaum terisih menuju ke suatu kepedulian dengan berbagai bentuk keikutsertaan warga dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan di berbagai gelanggang kunci yang mempengaruhi kehidupan mereka. Sementara itu menurut Cohen dan Uphoff dalam Siti Komariah (2010:131), menyatakan partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembuatan keputusan tentang apa yang dilakukan, baik dalam pelaksanaan program maupun dalam pengambilan keputusan.

Menurut Komariah (2010:133), Partisipasi publik akan memperluas jangkauan pelayanan pemerintah kepada seluruh masyarakat, menopang pembangunan, dan menyediakan lingkungan yang kondusif baik bagi aktualisasi potensi manusia maupun pertumbuhan manusia. Partisipasi juga merupakan cara yang efektif membangun kemampuan masyarakat untuk pengelolaan program pembangunan guna memenuhi kebutuhan lokal. Karena itulah, partisipasi dipandang sebagai pencerminan hak-hak demokratis individu untuk dilibatkan dalam pembangunan mereka sendiri.

Musyawah Perencanaan

Pembangunan Wahjudin beberapa Sumpeno (2011:228-229) menguraikan manfaat dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) adalah : memberikan kesempatan kepada berbagai pemangku kepentingan khususnya kelompok marjinal dan perempuan untuk mengemukakan ide, gagasan, harapan dan perubahan desa ke depan, setiap warga desa mendapat peluang yang sama untuk mengemukakan pendapatnya dalam forum musyawarah. 1 Manfaat diskusi dan curah pendapat (brainstorming) dapat menjadi kesempatan untuk belajar merumuskan strategi alternatif dan mendesain skenario pembangunan yang diharapkan masyarakat, proses pembelajaran dalam pembuatan kebijakan yang melibatkan beragam pemangku kepentingan yang berusaha untuk mempengaruhi isi dan bentuk kebijakan secara interaktif, pembuatan kebijakan sebagai upaya untuk menanggapi tuntutan dari berbagai kelompok kepentingan dengan cara bargaining, negosiasi, mediasi dan kompromi, dan Membangun forum dialog lintas

METODOLOGI PENELITIAN

Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan mulai Oktober April 2024 samapi Januari 2024 di Desa Pammulukang Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi

Menurut Arikunto (2004) bahwa populasi adalah semua orang yang menjadi obyek penelitian dan dianggap dapat mengetahui dan dapat memberikan keterangan atau data yang akurat mengenai permasalahan yang di bahas. Oleh karena itu, maka populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah Desa

Pammulukang dan seluruh masyarakat di Desa Pammulukang dengan jumlah populasi sebanyak 1732 orang...

Sampel

Sampel menurut Sugiono (2008:91), bahwa“ sampel adalah sebagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sedangkan menurut Arikunto (2004) bahwa sampel adalah sebahagian dari kuantitas populasi yang akan mencerminkan dari keseluruhan populasi tersebut. Dan apabila Populasi lebih dari 1000 maka populasi berdasarkan tingkatan atau jenjang dapat diambil penarikan sampel sebanyak 5%, 10%, 20% dan 30% dari total populasi. Mengingat jumlah populasi lebih dari 1000 orang, maka dalam menentukan sampel penulis menggunakan rumus Slovin (2014).

Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data tersebut dilakukan dengan cara:

1. Observation

Observasi yakni mengadakan penelitian langsung mengenai Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa melalui Kegiatan Musrenbang di Desa Pammulukang Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju.

2. Angket

Yakni suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan tertulis yang diberikan kepada responden dengan maksud untuk memperoleh data yang relevan yang berhubungan dengan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa melalui Kegiatan Musrenbang di Desa Pammulukang Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju:

3. Dokumentasi

yaitu mengumpulkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa melalui Kegiatan Musrenbang di Desa Pammulukang Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik

analisis data deskriptif kualitatif di mana jenis data yang berbentuk informasi baik lisan maupun tulisan yang sifatnya bukan angka. Data dikelompokkan agar lebih mudah dalam menyaring mana data yang dibutuhkan dan mana yang tidak. Setelah dikelompokkan, data tersebut penulis jabarkan dengan bentuk teks agar lebih dimengerti. Setelah itu, penulis menarik kesimpulan dari data tersebut, sehingga dapat menjawab pokok masalah penelitian

Untuk menganalisa berbagai fenomena di lapangan, langkah langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Pengumpulan informasi melalui angket, observasi langsung dan dokumentasi.
2. Reduksi Data yakni Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasikan data kasar yang diperoleh dari catatan lapangan. Langkah ini bertujuan untuk memilih informasi mana yang sesuai dan tidak sesuai dengan masalah penelitian.
3. Penyajian Data yakni Setelah data direduksi, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian (display) data. Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga makin mudah dipahami. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif. Pada langkah ini, peneliti berusaha menyusun data yang relevan, sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu. Prosesnya dapat dilakukan dengan cara menampilkan dan membuat hubungan antar fenomena untuk memaknai apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang perlu ditindaklanjuti untuk mencapai tujuan penelitian. Display data yang baik merupakan satu langkah penting menuju tercapainya analisis kualitatif yang valid dan handal.
4. Tahap akhir adalah menarik kesimpulan yang dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, sehingga data-data yang ada teruji validitasnya (Sugiono: 2010:9).
5. Karena sifat penelitian ini adalah deskriptif, maka penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan rumus untuk mengolah data atau keterangan yang dijelaskan dalam bentuk angka (Hasan Skadily 2006:34) $P = f \times 100 \% n$ Keterangan : P = Persentase f = frekwensi n = Jumlah frekwensi dari seluruh kategori. 100% = Angka Penggali (Harbani Pasolong : 2004)

Hasil Dan Pembahasan

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi

Desa Pammulukang, yang saat ini dikenal masyarakat mamuju sebenarnya awalnya berasal dari ucapan orang tua dulu adalah “pammuluang” yang artinya tempat para orang tua atau tokoh adat, tokoh agama, berkumpul untuk bermusyawarah atau mengadakan suatu upacara Tradisi yang dikenal dengan kata “Maulid”. Pada tahun 2000 setelah resmi terbentuk menjadi satu Lingkungan dikelurahan Sinyonyoi berubah kata menjadi “Pammulukang” karena kata tersebut diucapkan oleh dialek Sinyonyoi, Desa Pammulukang merupakan daerah pegunungan yang membentang dari arah utara ke selatan yang terdiri dari delapan (8) Dusun, yaitu Dusun Pammulukang Barat, Dusun Pammulukang Timur, Dusun Betteng Batu, dusun Rombia Apo, Dusun Tatora, Dusun 14 Pondok Indah dan Dusun Saludango. Dengan jumlah penduduk 1732 jiwa, dan jumlah Kepala keluarga (KK) 409. Sebelum mekarnya Desa Pammulukang, itu masuk daerah Kelurahan Sinyonyoi, Desa Pammulukang adalah salah satu dari lingkungan kelurahan sinyonyoi yang terdiri dari dua belas (12) lingkungan. sejak itu pelayanan pemerintahan Dikelurahan sinyonyoi sangat sulit efektif untuk di jangkau, disebabkan jauhnya jarak yang membentang dari Pegunungan yang memakan waktu yang cukup lama, sekitar ± 5 jam perjalanan menuju kantor kelurahan dengan jalan kaki karena akses jalan pada saat itu masih sulit, dan juga percepatan pembangunan Desa sulit dicapai bahkan terhambat karena luasnya wilayah Desa Pammulukang $\pm 42,13$ KM². Berangkat dari kondisi tersebut di atas, Sejak Tahun 2008 masyarakat Desa Pammulukang mulai bangkit dan sadar akan pentingnya sebuah pelayanan dan percepatan pembangunan di sebuah Desa, termasuk pelayanan kesehatan, pendidikan dan ekonomi serta pembangunan infrastruktur pedesaan, di saat itu pula masyarakat telah melakukan

Musyawarah dengan tujuan untuk membentuk Tim pemerakarsa atau panitia pemekaran Desa Pammulukang yang bertempat di Dusun Pammulukang Timur yang di hadiri oleh unsur Badan permusyawaratan desa (BPD), tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama dan tokoh pemuda. Dan dalam musyawarah tersebut, selain sepakat untuk memekarkan Desa, juga di sepakati bahwa Desa persiapan ini di beri nama Desa Pammulukang, dengan alasan daerah persiapan Desa tersebut berada didaerah padat penduduk dan terjangkau oleh semua Dusun Dusun yang ada di Desa Pammulukang.

Setelah Tahun 2008 akhirnya dalam Rapat Pleno DPRD. Kabupaten mamuju bersama dengan pihak eksekutif akhirnya telah menyetujui bahwa di antara 23 Desa yang akan di mekarkan di Kabupaten Mamuju adalah termasuk di dalamnya Desa Pammulukang. Sehingga secara administratif, Desa Pammulukang sah menjadi satu Desa yang otonom dari 142 Desa di kabupaten Mamuju.

1. Bidang Pembinaan Keluarga Miskin/Prasejahtera:

Desa Pammulukang juga mempunyai penduduk dengan status keluarga miskin seperti dengan Desa lainnya. Keluarga miskin ini dikelompokkan dengan kondisi keluarga prasejahtera sampai dengan Sejahtera III. Hasil pendataan pada Tahun 2012 terdapat 14 kk dari 8 Dusun yang ada di Desa Pammulukang yang masuk kategori miskin atau pra sejahtera sebanyak 25 laki-laki dan 20 KK perempuan yang

masuk kategori keluarga pra sejahtera. Berkaitan dengan keluarga miskin pada tahun 2012 jumlah KK yang menerima raskin sebesar 78 KK. Jumlah kuantum kg beras yang telah didistribusikan sebanyak 1 sak/15 kg/bulan.

2. Bidang Kesehatan

Pada tahun 2009 sarana kesehatan terdapat 1 Poskesdes, yang ada di desa. Adapun puskesmas berada di Desa lain yang jarak dari desa sejauh 2500meter sebagai sarana pelayanan kesehatan terdekat. Untuk tenaga

medis sebanyak 3 bidan di Poskesdes sebagai pusat pengobatan di Desa dan 0 perawat menempati Poskesdes yang terdapat di dusun Pammulukang Timur. Sebagian penduduk yang terdapat di dusun uhai Dangodan Batu puteh masih bisa dianggap masih terbelakang dengan kondisi mereka yang sangat terpencil, hingga jangkauannya sulit dan penduduknya hanya sedikit, sehingga tenaga medis tersebut lebih memilih tinggal di dusun yang jauh lebih banyak penduduknya.

3. Partisipasi Masyarakat terhadap Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Pammulukang dilihat dari Pengambilan

Keputusan Pada umumnya setiap program pembangunan masyarakat termasuk pemanfaatan sumber daya lokal dan alokasi anggarannya selalu ditetapkan oleh pemerintah pusat yang banyak hal lebih mencerminkan kelompok-kelompok kecil elit yang berkuasa dan kurang mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat banyak. Karena itu partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu ditumbuhkan melalui dibukanya forum yang memungkinkan masyarakat banyak berpartisipasi langsung dalam proses pengambilan keputusan tentang program-program pembangunan seperti musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrembang Desa).

4. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan deskripsi data di atas, maka hasil penelitian tentang Partisipasi Masyarakat terhadap Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Pammulukang dilihat dari Pengambilan Keputusan masuk kategori cukup berpartisipasi hal tersebut dapat dilihat dari 97 orang responden yang memberikan tanggapannya 24 orang atau 24,7% responden yang memberikan tanggapan sangat berpartisipasi. Adapun alasan responden memberikan tanggapan sangat berpartisipasi karena responden berpendapat bahwa setiap kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrembang Desa) di Desa Pammulukang, antusias masyarakat dalam mengikuti kegiatan tersebut sangat tinggi sehingga para tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda hadir dalam kegiatan tersebut sekaligus memberikan masukan tentang rencana program yang

akan dilaksanakan dalam pembangunan di Desa Pammulukang Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju. Responden yang memberikan tanggapan cukup berpartisipasi sebanyak 47 orang atau 48,5%. Adapun alasan responden memberikan tanggapan cukup berpartisipasi karena disamping antusias masyarakat dalam mengikuti kegiatan Musrembang tersebut cukup tinggi namun masih perlu ditingkatkan dengan menghadirkan perwakilan masyarakat dari setiap dusun yang ada di Desa Pammulukang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana diuraikan dalam bab IV di atas, maka penulis berkesimpulan bahwa partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Pammulukang masuk kategori cukup berpartisipasi. Hal tersebut dapat dilihat dari pengampilan keputusan, pelaksanaan kegiatan pembangunan, pemantauan dan evaluasi pembangunan serta pemafaatan hasil pembangunan yang persentase rata-rata responden memberikan tanggapan sangat berpartisipasi sebanyak 25,2%, persentase responden yang memberikan tanggapan cukup berpartisipasi sebanyak 47,9%, persentase responden yang memberikan tanggapan kurang berpartisipasi sebanyak 17,3% sedangkan persentase responden yang memberikan tanggapan tidak berpartisipasi hanya 9,3%..

SARAN

Sebagai akhir dari pembahasan ini, penulis meniptipkan harapan sebagai sumbang saran sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, pemerintah Desa Pammulukang perlu menghadirkan semuaperwakilan masyarakat dari setiap dusun yang ada di Desa Pammulukang.
2. Pemerintah Desa Pammulukang perlu meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap Musrembang Desa terutama dalam hal pengambilan keputusan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ancok Djamaludin. 2002. Teknik Penyusunan Yogyakarta : PSKK UGM
- Afiffudin. 2010. Pengantar Administrasi Pembangunan : Konsep, Teori dan Implikasinya. Bandung : Alfabeta.
- Komariah, Siti. 2010. Partisipasi Publik (Public Participation) dalam Konsep Pembangunan untuk semua (Development For All). Jurnal Negarawan No.16.
- Mikkelsen, Britha. 2011. Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya upaya Pemberdayaan: sebuah buku pegangan bagi para praktisi lapangan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Firmansyah, Saca. 2009. Partisipasi Masyarakat. www.sacafirmansyah.wordpress.com. Diunduh tanggal 14 April 2015.Haryatmoko. *Etika Publik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011
- Sabarguna, Boy S. 2006. Analisis Data Pada Penelitian Kualitatif. Jakarta: UI Press.
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung : Alfabeta.
- Suhrman. 2007. Partisipasi Warga dan Tata Pemerintahan. Diunduh tanggal 2 Maret 2014.Kartajaya, *Hermawan* dan M. Syakir Sula. *Syariah Marketing*, Bandung: Mizan, 2006 Kuncoro, Mu
- Sumpeno, Wahjudin. 2004. Perencanaan Desa Terpadu. Read. Ebook Gratis. www.wahyudinsumpeno.files.wordpress.com.
- Suwandi dan Basrowi. 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta : Rineka Cipta.
- Wikipedia. Diunduh tanggal 12 Maret 2015. Pengertian dan Prinsip Partisipasi Masyarakat